

## **SUBJEK PASCA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK MICHEL FOUCAULT**

### **Untara Simon**

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  
Email: [untara@ukwms.ac.id](mailto:untara@ukwms.ac.id)

### **Datu Hendrawan**

Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

### **Antonius Yuniarto**

Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

### **Abstrak**

*Tujuan artikel ini adalah untuk menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19, berbagai upaya yang dilakukan setiap organisasi sosial untuk menjaga keselamatan warganya menghasilkan berbagai strategi kuasa yang mengatur tindakan individu. Bagi setiap individu, proses politik ini menempatkan kebebasan dalam risiko. Dengan alasan demi keselamatan bersama, tiap orang dikondisikan untuk tidak menjadi subjek yang bereksistensi dan mengejar tujuannya sendiri. Oleh karena itu, artikel ini ingin menjawab pertanyaan dasar soal bagaimana strategi kuasa dijalankan dan mengarahkan tindakan individu pada masa pandemi juga bagaimana individu bisa menjadi subjek yang menentukan diri dan subjektivitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meta-analisis dan hermeneutika dengan menggunakan kerangka teori filsafat politik Michel Foucault. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 ini, strategi kuasa terhadap individu dilakukan untuk mencapai tujuan politik komunitas/masyarakat yang dianggap lebih penting daripada tujuan pribadi individual. Situasi ini menantang eksistensi subjektivitas. Meski demikian, belajar dari Foucault, peneliti menemukan bahwa eksistensi subjek tetap bisa dibentuk sekalipun individu berada dalam situasi kontrol politis. Pembentukan subjek ini terjadi jika seseorang mampu menentukan tujuan hidup yang ingin*

*dicapai, memahami hal-hal mendasar dalam hidupnya yang harus diubah untuk mencapai tujuan hidup, menentukan bagaimana ia berelasi dengan hal-hal mendasar, serta mampu mempraktekkan teknik atau strategi konkret.*

**Kata kunci:** *Michel Foucault, Kontrol, Individu, Kebebasan, Proses.*

### **Abstract**

*The main purpose of this article is to show that during the Covid-19 pandemic, various efforts made by social organizations to maintain their citizens' safety resulted in various control strategies that regulate individual actions. For each individual, this political process puts freedom at risk. For the sake of mutual salvation, everyone is conditioned not to be subject to whatever exists and to pursue their own goals. Because of this, this article wants to answer the question of how control strategies are run and direct an individual's actions during this pandemic and how an individual be the subject that determines himself and his subjectivity. The methods used in this study are meta-analysis and hermeneutics by using the theoretical framework of Michel Foucault's political philosophy. In this study, researchers find that during this time of Covid-19 pandemic, control over individuals is exercised to achieve society's political goals that are considered more important than individual goals. This situation challenges the existence of subjectivity. Nevertheless, learning from Foucault, researcher find that the existence of subjectivity can still be established even if individuals are in political control situations. This establishment of the subject occurs if an individual can determine the goal of life to be achieved, understand the fundamental things that must be changed to achieve the goal, determine how to relate to the fundamentals, and practice concrete techniques or strategies.*

**Keywords:** *Michel Foucault, Control, Individual, Freedom, Formed Subject.*

---

## **PENDAHULUAN**

Berhadapan dengan pandemi, ada berbagai cara yang digunakan untuk menghadapinya dan bertahan hidup. Tulisan Slavoj Zizek tentang cara-cara orang menghadapi pandemi membantu para pembacanya berefleksi. Belajar dari tulisan Elisabeth Kubler-Ross berjudul *On Death and Dying*, Slavoj Zizek,

melalui bukunya berjudul *Pandemic! COVID-19 Shakes the World*, mengisahkan tentang lima tahap berhadapan dengan pandemi (Zizek, 2020: 49). Sikap *pertama* adalah penolakan. Sikap menolak kematian tampak dalam kesediaan seseorang untuk menerima kondisi buruk itu sebagai hal yang mungkin terjadi dan telah terjadi, tetapi bukan untuk dirinya. Dalam hal pandemi, pandemi bisa terjadi tetapi situasi itu terjadi pada orang lain, bukan pada dirinya. Secara umum, hal ini tampak dalam sikap beberapa pemimpin negara yang tidak mengakui bahwa negaranya telah mengalami pandemi, sehingga terlambat (bahkan tidak mau segera melakukan langkah antisipasi darurat) dalam menghadapi pandemi. Secara diplomatis, mereka mengajukan gagasan “ya, ini kan memang biasanya terjadi, tetapi tidak terjadi pada saya dan kita, semoga tidak”.

Sikap *kedua* adalah marah. Kemarahan ini tampak dalam sikap mempertanyakan dan tidak mau menerima bahwa situasi buruk telah terjadi padanya. Dalam situasi pandemi, hal ini tampak dalam sikap-sikap para pemimpin negara yang setelah menyadari keterlambatannya dalam bersikap menghadapi pandemi tetap saja menolak untuk mengakui bahwa situasi buruk telah terjadi dan kemudian menyalahkan berbagai pihak atas situasi pandemi. Secara individual, sikap ini kentara dalam pertanyaan reflektif: “bagaimana mungkin ini terjadi padaku?” atau “ini adalah kesalahan perusahaan yang abai terhadap lingkungan dan pemerintahan yang tidak peduli pada kondisi alam”.

Sikap yang *ketiga* adalah sikap menawar. Ini adalah sikap penuh sesal dan berharap akan belas kasihan, karena ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari situasi buruk. Dalam situasi pandemi, hal ini tampak dalam pengharapan akan kemampuan menghadapi situasi jika ada kondisi-kondisi tertentu untuk menghadapinya. Secara konkret, ini tampak dalam ungkapan seperti “jika kita sejak awal tidak mengabaikan, kita bisa menunda atau bahkan menghindari situasi ini”.

Sikap *keempat* adalah depresi. Ini adalah sikap siap bukan karena ia memiliki banyak hal untuk dipertaruhkan dalam

pertarungan melawan situasi buruk, tetapi sikap siap karena tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi situasi. Ia tidak mau hal ini terjadi tapi terpaksa menghadapi situasi pandemi. Hal ini tampak dalam ungkapan: “*toh*, saya akan mati, jadi untuk apa saya meributkan sesuatu?” atau “sudahlah, ini sudah terlambat, kita telah kehilangan banyak hal. Mari kita jalani saja hidup ini sebisa-bisanya.”

Sikap *kelima* adalah menerima. Ini adalah sikap sadar akan situasi yang hadir dan, dengan kalkulasi rasionalnya, mampu berpikir jernih. Dalam kejernihan berpikir ini, orang berpikir secara rasional untuk mengupayakan perbaikan situasi. Secara konkret, hal ini tampak dalam ungkapan: “kita telah sangat terancam, mari kita mengubah seluruh cara hidup kita sebab pandemi ini adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama dengan langkah yang terukur.” Berhadapan dengan pandemi, tidak semua orang mengalami kelima tahap ini, tetapi tahapan ini dapat mewakili bagaimana banyak orang mengambil sikap yang berbeda-beda berhadapan dengan situasi pandemi yang datang tiba-tiba ini (Zizek, 2002: 49-50).

Dari analisis sederhana tentang sikap masyarakat dalam menghadapi pandemi, peneliti menilai bahwa situasi pandemi adalah situasi krisis multidimensi. Krisis ini dimulai dari krisis kesehatan dan menyebar ke krisis tata kelola dalam berbagai bidang lainnya (Mas’udi, 2020: 3-10, Tadesse, 2020). Krisis multidimensi ini tidak lepas dari proses globalisasi yang tidak hanya memungkinkan manusia mengatasi halangan jarak, tetapi juga memampukannya berbagi krisis dalam waktu yang sangat singkat. Inilah supraterritorialitas manusia dalam globalisasi (Scholte, 2002: 18). Krisis multidimensi ini tidak bisa ditangani sendiri. Dalam kerjasama dengan banyak pihak itu, setiap masyarakat dipaksa menjalankan berbagai strategi untuk mengatur dan mengontrol tindakan masyarakat serta cara mereka bereksistensi supaya semua orang selamat dan mampu mengatasi situasi krisis (Cheema, 2020).

Artikel ini ingin menunjukkan bahwa cara berada manusia dalam menghadapi masa pandemi ini telah terstruktur sedemikian

rupa. Belajar dari pemikiran filsafat politik Michel Foucault, artikel ini menggambarkan bagaimana struktur itu pada dasarnya mengontrol hidup manusia melalui strategi-strategi kuasa yang membuat individu terhalang untuk mengupayakan subjektivitasnya (Rabinow, 1997: 291-292).

Salah satu kebaruan penelitian ini adalah keterkaitan antara filsafat politik dan subjektivitas. Filsafat politik tampak dalam berbagai teknik dan strategi yang dilakukan dalam masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku setiap individu. Gambaran filsafat politik semacam ini cenderung mendorong penelitian berfokus pada persoalan kesehatan, ekonomi, politik dan sosial. Salah satu contohnya tampak dalam penelitian yang menggunakan pendekatan filsafat sosial, seperti dalam penelitian tentang konsumerisme yang muncul di masa pandemi (Indah & Muqsith, 2021). Dalam bidang etika, etika di masa pandemi juga telah menjadi bahan kajian filosofis, misalnya dalam penelitian tentang etika solidaritas (Sobon & Ehaq., 2021). Dalam bidang filsafat politik, penelitian pada umumnya berfokus pada soal bagaimana tata kelola masyarakat mampu menangani pandemi (Taddeo, 2020). Sementara itu, dalam studi filsafat politik, gagasan Michel Foucault yang sering diangkat adalah soal kontrol menggunakan pengetahuan, bukan tentang subjektivitasnya. Ini tampak dalam penelitian yang menunjukkan bahwa di masa pandemi relasi dominasi dijalankan melalui berbagai aturan (Apriliyadi & Hendrix, 2021)

Dalam artikel ini, pemahaman tentang bagaimana subjektivitas dibentuk dengan belajar dari pemikiran Foucault dibedah mulai dengan melihat bagaimana berbagai strategi politik bisa dijalankan di masa pandemi. Akan tetapi, fokus bukan pada bagaimana strategi itu dijalankan, melainkan pada bagaimana strategi-strategi ini mengkondisikan eksistensi subjek individual. Kemudian, belajar dari pemikiran Foucault pula, artikel ini menunjukkan kemungkinan bagi individu untuk membentuk subjektivitasnya. Oleh karena itu, pertanyaan dasar yang ingin dijawab di teks ini adalah: bagaimana strategi kuasa dijalankan

untuk mengontrol setiap individu dalam rangka menghadapi krisis pandemi Covid-19? Lalu, sikap apa yang sebaiknya dibangun dalam rangka membentuk subjek yang mampu mengarungi krisis karena pandemi Covid-19?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan metode metaanalisis dan hermeneutika. Metode metaanalisis dilakukan dengan cara menjalankan studi pustaka terhadap beberapa literatur yang membahas tentang pandemi dan karya-karya Foucault tentang kuasa dan subjek. Penelitian ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan eksplorasi data-data artikel bertema pandemi dan gagasan Michel Foucault yang dimuat dalam jurnal-jurnal. Untuk naskah jurnal ini, peneliti membatasi jurnal hanya pada yang terbit dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Setelah naskah terkumpul, peneliti melakukan pembahasan, perbandingan, dan analisis terhadap hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal-jurnal tersebut.

Metode hermeneutika yang digunakan di sini adalah hermeneutika genealogis. Dengan metode ini, penulis menafsirkan teks-teks tentang pemikiran Foucault dan data aktual pandemi dengan menitikberatkan pada soal bagaimana kuasa bekerja untuk mengkondisikan dan mengarahkan individu. Dengan metode itu, peneliti melihat bagaimana pada masa pandemi strategi kuasa dijalankan. Selanjutnya, peneliti membandingkan strategi kuasa itu dengan gagasan Foucault tentang subjek. Dengan membandingkan strategi kuasa itu dengan gagasan Foucault tentang subjek, peneliti mencari sisi-sisi yang memungkinkan terbentuknya subjektivitas.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dua Model Strategi Kuasa**

Situasi krisis kesehatan adalah situasi yang memungkinkan berjalannya kontrol terhadap masyarakat. Hal ini mengemuka dalam penelitian yang dilakukan oleh Ekki Karsani Apriliyadi dan Tommy Hendrix. Di sana, digambarkan bahwa kekuasaan berhubungan dengan strategi yang dijalankan pihak tertentu yang

bertujuan untuk mendorong pihak lain untuk patuh atau taat maupun mendorong pihak lain tunduk atau membuat pihak lain memberi dukungan terhadap pihak tertentu tersebut. (Apriliyadi & Hendrix, 2021)

Dalam karya aslinya sendiri, Foucault memang menunjukkan bagaimana situasi krisis bisa menjadi jalan bagi berjalannya mekanisme kekuasaan. Hal ini nampak dalam tulisannya tentang situasi di Prancis ketika pandemi melanda (Foucault, 1977: 73-103). Di sana, Foucault menunjukkan bahwa dalam menghadapi pandemi, pemerintah menyelenggarakan pengaturan khusus agar wabah tidak menyebar dan wabah yang terlokalisasi dapat ditangani. Pengaturan ini menghasilkan suatu tata kelola yang khas dan mengkondisikan seluruh warga kota untuk bertingkah laku tertentu. Pengkondisian pada masa wabah ini dibandingkannya dengan strategi kuasa yang dipraktekkan dalam proses pembentukan penjara. Dua model pemahaman tentang strategi kuasa ini nantinya akan berakibat pada pembentukan subjek. Dua model strategi kuasa dan kaitannya dengan strategi kuasa pada masa pandemi kami jelaskan dalam penjelasan berikut.

### *Pandemi dan Kota Hukuman*

Pembahasan tentang pandemi bukanlah hal baru dalam pemikiran Foucault. Di salah satu bagian pembahasannya tentang sejarah penjara, Michel Foucault membahas juga kisah tentang pandemi (Foucault, 1977: 195-200). Pembahasan Foucault tentang pandemi tidak berfokus pada soal sebab-sebab pandemi, tetapi soal bagaimana tindakan-tindakan strategis dilakukan untuk bertahan di masa pandemi.

Salah satu tindakan strategis yang dikisahkan Foucault adalah proses pembentukan kota hukuman. Ia menarasikan bahwa berdasarkan catatan militer Prancis yang dirilis pada akhir abad 17 ketika Prancis berhadapan dengan wabah, manajemen tiap kota akan diatur dengan sangat ketat. Satu bagian kota yang terkena wabah akan ditutup sementara. Sesuai dengan tingkat kepadatan

populasinya, wilayah kota akan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok akan dipimpin oleh seorang penanggungjawab kesehatan (Foucault, 1977: 195). Semua penduduk diharuskan tinggal dalam rumah mereka. Izin keluar hanya diberikan untuk kepentingan yang sangat mendesak, itupun dilakukan dengan mengupayakan proses perpindahan ruang yang seminimal mungkin. Mereka yang sakit dan yang sehat dicatat (Foucault, 1977: 196).

Pemerintah sadar bahwa masyarakat tidak bisa dikarantina tanpa bahan-bahan kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, karantina yang dilakukan harus juga disertai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Maka, secara berkala bahan makanan dikirimkan ke rumah-rumah. Tiap kali petugas hadir di tiap rumah, ia akan membawa daftar penghuni rumah. Ia akan berdiri di depan jendela bagian depan, membaca nama penghuni rumah tersebut satu persatu, dan meminta siapapun yang ada di dalam rumah tersebut untuk menunjukkan dirinya di jendela (Foucault, 1977: 196). Mereka yang tidak menunjukkan dirinya saat namanya dipanggil akan dipertanyakan kesehatannya. Bila ternyata ia terjangkit wabah, ia akan segera dibawa ke ruang isolasi khusus.

Pada waktu-waktu tertentu, petugas akan datang ke tiap rumah untuk membawa cairan disinfektan. Prosedurnya, mereka yang ada di dalam rumah diwajibkan keluar dan menunggu di luar rumah sambil disemprot disinfektan. Sementara, para petugas lain juga akan masuk dan menyemprot disinfektan ke seluruh isi rumah. Setelah semuanya selesai, rumah akan ditutup dan petugas akan memastikan bahwa cairan disinfektan bekerja dengan baik. Bahkan, lubang kunci pintu rumah akan ditutup dengan lilin agar seluruh bagian disinfektan tidak ada yang keluar. Setelah beberapa waktu, penghuni rumah akan diijinkan untuk masuk ke dalam rumah kembali dan hidup berjalan seperti masa karantina sebelumnya (Foucault, 1977: 197). Demikianlah, situasi terus dievaluasi setiap hari hingga saat situasi sudah semakin membaik. Bila itu terjadi, kota dibebaskan dari karantina dan setiap orang diijinkan beraktivitas seperti sebelum masa wabah.

Karantina akibat wabah di abad 17 adalah situasi yang mengerikan. Bukan hanya karena tidak seorangpun boleh pergi ke luar rumah, tetapi lebih dari itu, siapapun yang memaksa diri berada di luar rumah apalagi berusaha untuk keluar dari kota akan menghadapi hukuman tanpa pengadilan. Otoritas negara memberi izin untuk membunuh para pelarian. Di sini, agar satu kota dan satu negara bisa bebas dari wabah dan kematian, tiap orang justru mendapat ancaman kematian. Inilah situasi yang terjadi di kota hukuman. Meski kejam, strategi untuk mengontrol tindakan masyarakat ini sangat efektif, sekalipun tidak efisien karena membutuhkan biaya besar dan menyebarkan ketakutan (Foucault, 1977: 198). Pada masa pandemi akhir-akhir ini, sikap membangun kota hukuman sebagaimana kisah di atas juga dilakukan sebagai strategi kontrol di beberapa masyarakat, khususnya dalam masyarakat dengan pemerintahan otoriter. Bahkan, banyak berita membongkar bahwa siapapun yang sakit justru akan segera dibunuh demi keselamatan anggota masyarakat lain. Dalam kasus lain, kota hukuman tidak ditunjukkan dengan mengancam mereka yang kabur dari wilayahnya dan menolak proses karantina, tetapi dengan mengancam para jurnalis yang ingin mengabarkan kejadian-kejadian di kota tersebut pada masyarakat luar. Tujuan ancaman ini adalah demi stabilitas wilayah dan demi menghindari ekspose berlebihan terhadap tindakan penanganan wabah yang penuh kekerasan. Yang menarik, banyak orang (kebanyakan orang yang sangat baik dan beradab) memuji tindakan negara yang sangat keras terhadap rakyatnya tersebut dengan dalih keselamatan bersama.

Pada kenyataannya, tidak semua otoritas memilih cara keras *ala* kota hukuman. Foucault sendiri juga melihat bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai ketaatan dan kontrol (Foucault, 1977: 207-208). Cara lain untuk melakukan kontrol digagasnya dalam pemikirannya tentang disiplin yang menjadi sangat nyata pada naskah tentang kisah sejarah penjara.

### ***Penjara dan Kontrol Melalui Pengetahuan***

Strategi kontrol masyarakat yang berbeda ditunjukkan Foucault dalam narasinya tentang proses penghukuman dan terbentuknya penjara (Foucault, 1977: 104-131). Pada sekitar abad 17, negara (otoritas publik) menganggap bahwa para penjahat dan musuh negara adalah orang yang berbahaya bagi publik karena kejahatannya memberikan teror dan ketakutan pada masyarakat. Kejadian kejahatan juga menunjukkan betapa rapuhnya sang penguasa wilayah, sehingga tidak mampu melindungi masyarakat di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, sikap terhadap para penjahat yang tertangkap adalah sikap keras yang bertujuan untuk membalas dendam sekaligus memulihkan legitimasi kontrol penguasa atas masyarakat. Untuk menunjukkan kekuasaan sang pemegang otoritas dan memberi efek jera pada siapapun yang punya keinginan untuk membuat kejahatan, para penjahat itu disiksa di alun-alun kota.

Proses yang melibatkan ritual penyiksaan di depan publik itu dijalankan secara bertahap. Tahapan penyiksaan selalu mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Tiap tahapan selalu dijeda dengan hadirnya seorang imam untuk menanyai sang tertuduh tentang kemungkinannya untuk mengaku di depan publik. Pengakuan itu akan menjadi tanda kekalahan penjahat dan legitimasi kekuasaan sang penguasa. Paksaan untuk mengakui bahwa perbuatan jahat itu dilakukannya adalah sesuatu yang penting untuk menunjukkan bahwa sang “raja” telah menguasai keadaan dan berkuasa terhadap para penjahat. Kekuasaan ini disertai dengan “kebenaran” yang dikonstruksi bersamaan dengan pengakuan sang penjahat mengenai kejahatannya. Sayangnya, pengakuan yang muncul dari para penjahat yang tertangkap seringkali justru menunjukkan bahwa hukuman yang diterima itu tidak adil, karena salah tangkap atau karena ketahuan bahwa sang tertuduh memang dipaksa mengiyakan narasi tentang sebab-sebab kejahatan yang telah disiapkan oleh para penyidik. Menurut Foucault, situasi ini sering menghasillkan pemberontakan yang

kontraproduktif bagi kekuasaan sang pemimpin (Foucault, 1977: 57-58, 62).

Hampir bersamaan dengan situasi kontraproduktif dalam memperoleh legitimasi kekuasaan itu, berkembanglah pula gagasan Humanisme (Foucault, 1977: 74). Ide ini berkembang pada masa Modern dan menegaskan bahwa manusia itu juga memiliki ciri individual yang punya martabat dan hak individual, tetapi pikirannya dapat diubah dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, jika orang melakukan kejahatan, tubuhnya tetap tidak pantas disiksa. Ia harus dibantu untuk mengubah jiwanya. Terkait dengan martabatnya sebagai manusia dan individualitasnya, sejahat apapun para penjahat diyakini dapat berubah. Orang-orang jahat ini justru harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan 'menebus' kesalahannya. Dari sini, ide tentang pembentukan "rumah perubahan hidup" mewujud dalam pembentukan penjara.

Dalam penyelidikan Foucault, penjara pada mulanya dibangun dengan persiapan yang sangat ketat untuk mendorong siapapun yang masuk di dalamnya agar mengubah tingkah lakunya (Foucault, 1977: 104). Di sana, para narapidana dipisah-pisah dan diperlakukan berbeda berdasarkan tingkatan kejahatannya. Di penjara, semua aturan dan hukuman yang diberlakukan dibuat bukan sekadar untuk menghukum tanpa tujuan lainnya. Kisah-kisah para korban kejahatan perlu disampaikan pada para pelaku kejahatan agar para pelaku kejahatan itu mengetahui bahwa setiap orang yang menjadi korban kejahatannya itu menjalani penderitaan yang seharusnya tidak ia terima. Bacaan buku-buku tertentu ingin menyampaikan pada para pelaku kejahatan itu bahwa ada alternatif lain yang mungkin dijalani dalam hidup ini selain menjadi penjahat. Bekerja memperbaiki dan mempercantik fasilitas publik mengajak para pelaku kejahatan untuk memahami bahwa pembangunan fasilitas publik bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga perusakan terhadapnya tidak seharusnya dilakukan.

Keberadaan penjara ini juga menjadi sarana pendidikan warga masyarakat (Foucault, 1977: 111). Pada saat tertentu, penjara akan dibuka untuk umum agar warga masyarakat bisa datang ke penjara

dan melihat situasinya. Harapannya, warga masyarakat mengetahui bahwa setiap pelaku kejahatan menerima hukuman setimpal (meski masyarakat tidak melihat secara langsung melihat bagaimana proses penghukuman itu dilakukan seperti yang terjadi pada masa-masa penyiksaan publik). Tujuannya adalah agar masyarakat tidak terdorong untuk melakukan kejahatan. Sementara itu, bagi narapidana, kehadiran warga masyarakat yang menonton mereka diharapkan membangkitkan rasa malu dalam diri mereka sehingga mereka menyesali kejahatan yang mereka lakukan.

Melalui penjara inilah, negara bisa sekaligus menunjukkan pada warga masyarakat bahwa mereka telah melakukan semua yang harus dilakukan berhadapan dengan para pelaku kejahatan yang mengganggu ketenangan warganya. Demikianlah, berbeda dari penyiksaan di depan publik, penjara menjadi semacam sekolah yang menjalankan fungsi ganda terkait dengan kekuasaan (Foucault, 1977: 112). Di satu sisi, penjara menjadi tempat pendidikan baik bagi para pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat. Sementara, di sisi lain, penjara menjadi tempat di mana negara menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya atas seluruh tingkah laku warga masyarakat yang hidup di wilayahnya.

Apakah prinsip keseluruhan ide tentang penjara ini terkait dengan kekuasaan? Prinsip utamanya adalah bahwa melalui suntikan pengetahuan, setiap orang bisa diubah tingkah lakunya. Karena tahu bahwa korban sedemikian menderita, pelaku kejahatan diharapkan terdorong untuk menyesali tindakannya. Karena tahu bahwa ada alternatif tindakan selain kejahatan, seseorang diharapkan meningkatkan kehendaknya untuk memilih hal-hal yang sesuai dengan aturan dan tata tertib. Karena tahu bahwa fasilitas publik itu penting dan sulit dibangun, seseorang diharapkan menyesali perusakan publik. Karena tahu bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum, orang tidak ingin berbuat jahat. Karena tahu bahwa negara menghukum penjahat, orang jadi menghormati hukum yang dibuat oleh negara. Demikianlah, injeksi pengetahuan menjadikan seseorang secara

sadar merasa diawasi dan terdorong untuk melakukan tindakan sesuai dengan pengetahuannya. Di sana pula, tampak bahwa dalam injeksi pengetahuan itu, pemerintah hadir dalam pikiran setiap orang sebagai pengawas tindakan.

Upaya kontrol atas tingkah laku manusia akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien jika dioperasikan melalui penciptaan atau injeksi pengetahuan. Bagi Foucault, dalam gagasan masyarakat yang beradab dan manusiawi, proses ini adalah salah satu kunci bagi penanaman kekuasaan yang akan menghasilkan kontrol terhadap tingkah laku publik untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang "taat" tanpa perlu melakukan kekerasan (Foucault, 1977: 138).

Berbeda dengan model kota hukuman, kontrol dan ketaatan dalam apa yang dilakukan dalam penjara ingin menunjukkan bagaimana ketaatan dapat ditumbuhkan tanpa kekerasan dan memberi efek yang tetap dalam jangka panjang dan sangat ekonomis. Sifat tanpa kekerasan ini tentu saja tidak bisa dikatakan mutlak menghilangkan sifat kekerasan dalam semua bentuknya. Di sini, kekerasan bisa jadi digunakan, tetapi kekerasan demi dirinya sendiri tidak pernah dijadikan sebagai tujuan akhir. Kekerasan hanya bisa digunakan sejauh dibutuhkan untuk memaksimalkan kontrol secara efektif dan efisien. Bagi pelaku (pengelola kontrol), kekerasan tidak boleh menjadi ajang untuk balas dendam, tetapi hanyalah bagian dari strategi kontrol yang bisa digunakan secara terukur jika diperlukan. Efek jangka panjang dari kontrol tercipta, terutama karena dalam gagasan injeksi pengetahuan mengubah kesadaran ini, setiap orang menginternalisasikan berbagai paksaan yang harus dijalannya dengan alasan-alasan yang diterima dan disetujuinya karena menurutnya masuk akal.

Dalam konteks masa kini, paksaan yang diinternalkan dengan cara semacam ini, pada dasarnya, kita kenal dalam dunia pendidikan. Di sana, orang-orang yang menjalani perubahan kesadaran itu tidak merasa bahwa tindakan baru yang mereka ambil atas dasar kesadaran baru diperolehnya sebagai paksaan dari orang lain, tetapi sebagai penemuan sadar atas hasil pencariannya dalam proses pengetahuan. Pada mulanya, apa yang harus

dipelajarinya sebenarnya telah diarahkan, tetapi sang pembelajar juga menemukan banyak hal baru sesuai dengan kehendaknya. Di situlah, seseorang yang tindakannya berubah merasa bahwa ia mengubah tindakannya dengan penuh kebebasan. Jika dihitung dengan penghitungan bisnis masa kini, kontrol semacam ini adalah kontrol yang sangat hemat.

Di masa pandemi Covid-19, model kontrol atas individu dengan mengedepankan strategi kuasa dengan injeksi pengetahuan inilah yang kebanyakan dijalankan oleh berbagai organisasi sosial dalam menghadapi pandemi. Strategi kuasa ini tidak dijalankan dalam institusi tertutup seperti sekolah atau penjara, tetapi dengan sensor dan pengetatan distribusi wacana. Andaiannya, bila suatu pengetahuan diperkirakan akan mendorong pada situasi tidak tertib dan tidak sesuai dengan tujuan rezim, pengetahuan itu akan ditahan dan dilarang didistribusikan. Sebaliknya, bila pengetahuan itu memiliki kegunaan untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan masyarakat yang berguna untuk mendukung tujuan rezim, pengetahuan itu akan diterima dan diwacanakan. Dalam negara yang cenderung totaliter, pembatasan pengetahuan cenderung dilakukan dengan didukung oleh kekerasan fisik dan verbal. Dalam negara yang cenderung demokratis, pembatasan informasi tidak dilakukan dengan pengetatan dan sensor, tetapi dengan distraksi informasi dan pembangunan informasi tandingan.

Tanpa bertendensi untuk menyederhanakan persoalan yang muncul, peneliti melihat bahwa pembangunan informasi tandingan yang secara masif dijalankan dengan pola distribusi wacana yang cepat dalam masyarakat demokratis akan mengakibatkan menjamurnya "informasi alternatif". Dalam banyak studi postmodern, informasi alternatif yang tidak sesuai dengan alur pikir institusi atau organisasi sosial (misalnya negara atau perusahaan) sering disebut sebagai *hoax* dan *fake news*. Dalam hal ini, masyarakat berhadapan dengan situasi baru kemanusiaan yang memaksa individu untuk mempertanyakan kembali kehendak bebas dan subjektivitasnya. Sebab, ternyata kebebasannya rawan dimanipulasi oleh kehadiran informasi alternatif yang

mengarahkan tindakannya. Dalam tradisi teori kritis, strategi penghadiran informasi ini berciri menyeragamkan dan mengarah pada pembentukan masyarakat satu dimensi (Marcuse, 2002: 1).

## 2. Kritik atas Subjektivitas

Gagasan Foucault tentang kuasa dan kontrol yang tampak dalam strategi kuasa ini pada dasarnya memberi kritik terhadap konsep subjek yang digagas oleh para pemikir Modern. Descartes dan banyak tokoh Modern lainnya yakin bahwa kesadaran adalah entitas yang bebas dan otonom sebagai penentu kebenaran yang diyakini oleh seseorang. Terkenal sebuah semboyan Descartes: *Cogito Ergo Sum* (Aku berpikir maka aku ada). Bersama para pemikir lainnya, Descartes meyakini bahwa sejak awal mula, *ego* (*The I* atau kesadaran) ini adalah entitas riil yang bebas dan mampu menentukan diri. Hal ini tidak lepas dari ide tentang substansi, yang dalam gagasan Aristoteles dipahami sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan hal-hal lainnya untuk bereksistensi. Sejak Descartes, ide tentang substansi yang dipahami ada di setiap objek sebagai konsekuensi gagasan realisme disangsikan.

Bagaimana mungkin realitas dinamai (dikenali sebagai suatu konsep) jika tidak ada kesadaran manusia? Dari sanalah, rasio manusia ditempatkan dalam posisi yang lebih tinggi daripada benda-benda lainnya. Melalui pemahamannya, manusia mengonsepsikan segala benda yang hadir di sekitarnya dan, dengan demikian, benda-benda itu menjadi ada (*exist*) bagi manusia. Oleh karena itu, dari yang sebelumnya segala sesuatu (realitas) bisa menjadi subjek bagi diri mereka sendiri, pada masa Modern, realitas menjadi hanya dipahami berada ketika disadari oleh manusia. Maka dari itu, yang bebas adalah akal budi atau kesadaran manusia, sedangkan benda-benda pada dasarnya berada setelah akal budi. Sebagaimana dinarasikan oleh David Carr, Heideggerlah pemikir yang melihat bahwa terjadi peralihan ini (Carr, 1999: 16-17).

Demikianlah, sejak Modernitas, kebebasan itu hanya milik akal budi dengan manusia yang menyandangnya sebagai alat untuk mengetahui. Mulai dari sinilah, gagasan tentang subjek dipahami.

Mengenai gagasan tentang subjek ini, ide Foucault menghadirkan kritik terhadap subjek Modern. Jika subjek yang mengetahui (kesadaran) itu ternyata bisa dikondisikan sedemikian rupa oleh pengetahuan yang terstruktur dan *berseliweran* keluar masuk pikirannya, bagaimana mungkin kesadaran dipahami sebagai entitas yang bebas dan bisa menentukan diri? Lebih konkret lagi, jika dalam masyarakat kontemporer seperti masa kita ini, setiap orang dididik sedemikian rupa dan pengetahuan yang diajarkan ini selalu memuat elemen kekuasaan (sekurangnya kepentingan tertentu) di dalamnya untuk mengatur tingkah laku, bisakah kita mengatakan bahwa seseorang memiliki kebebasan? Di sini, subjek tidak lagi sekadar dinilai berciri transendental, tetapi juga meruang dan mewaktu. Ia bisa berubah seiring dengan perjalanannya melintasi sejarah. Bahkan, ia bisa dikondisikan sesuai dengan kepentingan tertentu. Dalam gambaran Foucault, perubahan ini bisa dilakukan dengan berbagai teknologi pembentuk subjek (Rabinow, 1997: 225).

### ***Subjek itu Bentukan***

Bagaimana teknologi pembentukan subjek ini bekerja? Dalam seminar di Universitas Vermont pada bulan Oktober 1982, Foucault menyebut bahwa ada empat tipe utama dari teknologi pembentukan diri. Yang pertama adalah teknologi produksi. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menghasilkan dan mengubah sesuatu. Yang kedua adalah teknologi sistem tanda. Teknologi ini adalah teknik-teknik yang memungkinkan manusia untuk menggunakan berbagai sistem penandaan, simbol dalam hidup bersama, berkomunikasi satu sama lain, dan mengaktualisasikan diri. Teknik ini membantu manusia bertahan hidup lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan material dan fisik. Yang ketiga adalah teknologi kuasa. Teknologi ini memungkinkan

manusia untuk mengontrol dan mengarahkan orang lain menuju tujuan tertentu. Kekuasaan umumnya dipahami ada dalam konteks ini. Keempat adalah teknologi diri. Teknologi ini adalah teknik-teknik yang memungkinkan seseorang untuk memengaruhi dirinya sendiri untuk menuju tujuan yang ditentukannya sendiri. Di sini, tidak semua hal harus dilakukan sendiri. Dalam banyak hal, upaya menuju tujuan yang telah ditentukannya ini membutuhkan bantuan orang lain. Namun, penentu utamanya adalah diri demi diri. Tujuan akhirnya jelas: Suatu tingkatan kebahagiaan, kebijaksanaan, kesempurnaan, atau hal-hal lain yang semacamnya (Rabinow, 1997: 225).

Keempat teknologi diri ini, pada umumnya, tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi berjalan beriringan dan saling berkelindan satu sama lain. Contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah suasana masyarakat industri yang hingga kini terus-menerus berkembang. Dalam masyarakat industri, yang menjadi tujuan utama adalah upaya pemenuhan kebutuhan material dengan melakukan berbagai perubahan bentuk benda dari benda mentah ke benda jadi kemudian menjadi komoditas. Teknologi produksi ini, pada perkembangannya, mengedepankan sistem usaha bersama yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (misalnya pabrik) dan pada waktu tertentu (tampak dalam jam kerja). Masyarakat yang hidup dalam dunia industri, mau tidak mau, harus menyesuaikan diri dengan pola pikir industri. Ada kontrol terhadap pola pikir dan perilaku yang dijalankan oleh para pelaku industri (tampak dalam strata/tingkatan pangkat di perusahaan). Ada juga kontrol terhadap masyarakat agar setiap orang bisa bekerja sesuai aturan di dalam pabrik/perusahaan (misalnya sinkronisasi jam kerja karyawan dengan jam belajar siswa sekolah). Lebih dari itu, ketika industri telah berkembang sedemikian rupa, ada “kesepakatan” bersama mayoritas masyarakat untuk mengubah tingkah lakunya, sehingga hasil industri ini dapat terserap di pasar. Bagaimana masyarakat bisa diam-diam “bersepakat” untuk mengonsumsi hasil industri? Di sinilah teknologi sistem tanda dimainkan melalui berbagai media

komunikasi. Dari permainan sistem tanda itu, pola konsumsi dan tingkah laku lainnya diarahkan dan dibentuk menjadi suatu tatanan tertentu sebagaimana dibutuhkan. Mereka yang hidup dalam tatanan itu tanpa mempertanyakannya akan disebut normal, sedangkan mereka yang selalu mempertanyakannya akan dicap abnormal. Perbedaan ini merupakan bagian dari teknologi kuasa/kontrol yang berjalan dalam masyarakat. Perbedaan ini berguna untuk “mendidik” semua orang dan mengarahkan semua orang pada pola perilaku yang diinginkan oleh publik (baca=normalitas). Demikianlah, semua elemen digunakan untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang membawa pada ketidaktertiban dan kekacauan.

Dalam situasi pandemi, teknologi-teknologi itu dijalankan sebagai strategi kuasa, beberapa teknologi lain dikendorkan, tetapi beberapa lainnya dimaksimalkan untuk melakukan manajemen hidup keseluruhan umat manusia, sekalipun dengan berbagai batasan demi tetap bertahan hidupnya umat manusia. Hal ini tampak dalam perubahan (pengembangan) usaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi pandemi. Untuk alasan bertahan hidup itu pula, berbagai teknologi sistem tanda dimaksimalkan dalam berbagai model pendidikan (misalnya pendidikan daring), literasi, dan ‘iklan’ dengan menggunakan semua alat yang mungkin. Semua ini saling berkelindan dengan berbagai teknik kontrol yang dilakukan oleh institusi-institusi, hidup bersama untuk mencapai tujuannya dan menjaga tiap orang yang ada di bawah tanggungjawabnya. Hasilnya adalah pola pikir, pola tingkah laku, dan pola hidup baru yang dilakukan demi tujuan yang kurang lebih sama: lolos dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi. Itulah bentuk subjeksi baru yang dilakukan melalui berbagai teknologi bagi hidup bersama.

Bagi Foucault, bagian yang sering dilewatkan dari keempat teknologi di atas adalah bagian keempat, teknologi diri. Dalam tiga teknologi sebelumnya, menjadi tampak bahwa teknologi-teknologi itu berjalan dalam hidup dan saling berkelindan membentuk serta

mengarahkan pola perilaku masyarakat dalam hidup bersama dan individual kita. Meski demikian, dari ketiganya, akan sulit untuk menemukan bagaimana kebebasan diekspresikan. Terlebih, ketika teknologi kekuasaan itu berjalan melalui kontrol atas pengetahuan rasional, tampak betapa kebebasan sudah tidak lagi berdaya melawan kontrol yang disuntikkan ke dalam akal budi kita. Dalam tradisi psikologi pada umumnya, kontrol dari luar ini sering dianggap hanya memberi pengaruh pada kehendak bebas. Namun, dalam tradisi Pascastrukturalisme, khususnya setelah Lacan. Teknologi kontrol secara mendasar telah menstruktur ke dalam kesadaran (dan ketidaksadaran) setiap pribadi yang berada dalam tatanan simbolik melalui bahasa, sehingga seluruh pola pikir pada dasarnya telah terstruktur oleh simbol dan tatanan yang dipelajari oleh seseorang sejak ia belajar bahasa di tempat ia hidup (Schroeder, 2005). Situasi struktural ini memengaruhi kehendak pribadinya.

Dalam situasi manusia yang sedemikian terstruktur inilah, teknologi diri memberi jawaban tentang bagaimana ide tentang “menjadi subjek” mau diwujudkan. Sekalipun manusia hidup dalam berbagai arus pengetahuan yang ingin mengontrol berbagai gagasan dalam akal budi yang memengaruhi pilihan-pilihan hidupnya, manusia tetap bisa mengambil sedikit celah dari ketidakbebasannya itu dengan menerapkan teknologi diri. Dalam teknologi diri ini, ia menentukan apa yang menurutnya bernilai untuk dikejar, menentukan cara-cara dan bahan-bahannya serta menjalani eksistensinya demi dirinya sendiri. Di sinilah, ia mempraktekkan kebebasannya untuk mengkreasikan diri menuju proyek-proyek yang ditentukannya sendiri. Demikianlah, bagi Foucault, kesadaran manusia yang dikondisikan oleh berbagai struktur pengetahuan itu tetap mampu mengupayakan kebebasannya (Rabinow, 1997: 292).

### ***Membentuk Subjek Pasca Pandemi***

Pembentukan subjek di masa pandemi Covid-19, menurut hemat peneliti terkait dengan tiga hal. *Pertama*, adalah kejelasan

situasi riil pandemi yang pada dasarnya tidak sepenuhnya pasti. Kita menemui banyak fakta terkait pandemi, tetapi persoalannya, dalam situasi ini, manusia berhadapan dengan makhluk yang tidak bisa dengan mudah kita indera. Oleh karena itu, kepastian yang biasanya kita gapai melalui prosedur verifikasi inderawi menjadi terkendala tanpa alat yang memadai. Karenanya, tidak berlebihan bila situasi ini dinilai sebagai situasi ketidakpastian. Dalam situasi ketidakpastian semacam ini, semua klaim kebenaran sangat layak untuk selalu dicurigai validitasnya. Demikian pula, sikap berhadapan dengan situasi pandemi menuntut manusia untuk selalu waspada. Bukan hanya pada orang lain, melainkan juga pada dirinya sendiri. Bukan tidak mungkin tubuh yang sering dilihat sebagai kendaraan bagi kesadaran justru menghancurkan diri karena kesadaran yang “merasukinya”. Dalam situasi tidak pasti ini pula, kita akan berhadapan dengan berbagai teknologi sistem tanda yang mungkin menyesatkan kita. Oleh karena itu, ciri subjek yang paling masuk akal di masa ini adalah subjek yang penuh kecurigaan.

*Kedua*, terkait dengan sikap yang mendorong dipraktikkannya berbagai teknologi pengendalian pola perilaku manusia demi tujuan tertentu di masa pandemi. Pandemi dimulai dari krisis kesehatan, tetapi berlanjut ke krisis psikologis dan krisis ekonomi. Situasi ini saling berkelindan satu sama lain dalam membangun hidup bersama kita. Tidak satupun penyelesaian atas krisis itu bisa diselesaikan oleh satu bidang saja tanpa melibatkan bidang lainnya (Nicola, 2020). Secara konkret, krisis ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya dengan gelontoran investasi dan pembangunan infrastruktur. Investasi tidak bisa dimunculkan tanpa optimisme psikologis terhadap kemampuan suatu masyarakat mengatasi berbagai krisis. Optimisme psikologis ini tidak mungkin dimunculkan dalam suatu tatanan hidup bersama yang carut-marut karena pandemi. Dari pandemi, soal kesehatan individual bukan lagi urusan pribadi individu, melainkan juga urusan komunitas tempat seseorang bernaung (Spinelli, 2020). Bahkan kesehatan individual adalah urusan global.

Dalam situasi semacam ini, berbagai praktek teknologi kendali/kontrol harus dikerahkan untuk mengarahkan hidup bersama agar siapapun memfokuskan diri dalam satu tujuan yang sama: bertahan hidup dalam kebersamaan di masa pandemi. Mengingat pandemi ini bersifat global, keselamatan eksklusif yang ditujukan hanya untuk kelompok tertentu akan menjadi sia-sia sebab globalisasi telah membuat kita saling terhubung satu sama lain. Pada dasarnya, manusia harus memahami bahwa kita hidup di dunia yang sama dan menghirup udara dari sumber yang tidak berbeda. Dalam hal ini, sikap menggelorakan hidup bersama yang bersama-sama bahu-membahu mengatasi wabah menjadi sangat penting. Berbagai teknologi kontrol berbasis pada solidaritas perlu ditumbuhkan agar mampu mengatasi situasi pandemi bersama-sama. Dalam bahasa Zizek, kita ada di kapal yang sama, kita perlu mengembangkan tingkatan tertentu dari komunisme, alih-alih menggelorakan gagasan-gagasan individualistik kapitalisme (Zizek, 2020: 56). Ini adalah ciri kedua yang diharapkan terjadi pada subjek pasca pandemi.

Hal ketiga, terkait dengan teknologi diri. Di masa pandemi, banyaknya teknologi kontrol terhadap masyarakat perlu disadari. Dalam kesadaran ini, kita diharapkan mampu mengambil jarak dengan situasi dan melihat bahwa dalam hidup ini kita dihadapkan pada banyak pilihan yang bisa kita tentukan sendiri. Kesadaran ini adalah dasar bagi teknologi diri yang berupaya untuk membentuk diri sebagai subjek bagi dirinya sendiri. Dalam penyelidikan terhadap tradisi praktek seksualitas pada masa kuno, Foucault memahami praktek teknologi diri ini dapat ditemukan sesuai dengan situasi dan zaman di mana seseorang hidup (Foucault, 1986). Dalam tradisi Yunani Kuno, misalnya, akan tampak berbagai praktek penguasaan diri (*self-mastery*) sebagai bentuk pencapaian kebebasan seseorang.

Di masa pandemi seperti sekarang ini, upaya membentuk diri diperlukan karena manusia dihadapkan pada berbagai arus yang tidak mudah dipahami. Pandemi yang tidak kasat mata, kebijakan-kebijakan terkait pandemi yang tidak selalu bisa disampaikan

secara terbuka, dan sikap banyak orang yang terpaksa menjalani cara-cara baru dalam hidup dapat menjadi rayuan bagi kita untuk sekadar mengikuti arus. Dalam tradisi pemikiran eksistensialisme, sikap ini adalah sikap tidak memilih dan membiarkan diri larut dalam arus individu massa. Ia tidak kritis dan dengan demikian tidak mengupayakan pembebasan dirinya.

Bagaimana sikap kritis dan upaya kebebasan diri oleh diri ini dijalankan? Sejauh peneliti elaborasi dari penelitian Foucault terhadap tradisi Yunani-Romawi Kuno dan Kristianitas dan Modernitas, ada empat hal yang perlu ditentukan dalam mewujudkan kebebasan dan pembentukan subjek (Foucault, 1986: 26-28). *Pertama*, seseorang harus mampu menentukan tujuan yang ingin dicapainya dalam hidup. Dalam konteks pandemi, tujuan ini bisa berupa kebahagiaan batin, keselamatan hidup, ketenangan emosional, dan lain sebagainya. *Kedua*, seseorang harus menentukan hal-hal mendasar apa yang harus diubahnya demi mencapai tujuan hidupnya. Dalam hal ini, hal-hal mendasar itu bisa berupa hasrat-hasrat pribadi, pola pikir, perasaan, dan lain sebagainya. *Ketiga*, seseorang harus menentukan bagaimana ia akan berelasi dengan hal-hal yang ingin diubahnya, sehingga ia mencapai tujuannya. Hal ini tampak dalam kesediaan seseorang untuk mengikuti cara hidup atau pola kegiatan tertentu yang dipilihnya secara sadar agar ia terbantu untuk mengarahkan dirinya, sehingga semangatnya untuk mencapai tujuan diri bisa terus berkobar. *Keempat*, seseorang harus menentukan strategi konkret untuk mengondisikan diri, sehingga diri bisa mencapai tujuannya. Bagian keempat ini terkait dengan teknologi sehari-hari yang mengondisikan dirinya sendiri agar mencapai tujuan hidup. Hal ini bisa berupa jadwal harian, pola waktu makan, aturan pengolahan mental, dan lain sebagainya. Dalam praktek keempat hal ini, setiap orang diharapkan tidak kehilangan orientasi ketika ia berhadapan dengan berbagai arus pemikiran yang memberinya berbagai tawaran jalan hidup di masa pandemi Covid-19.

Tentang hal ini, bukan berarti seseorang harus secara kaku mempraktekkan apa yang diyakininya tanpa terbuka pada

perubahan. Orang yang mewujudkan kebebasan justru secara sadar siap berdialog dengan realitas dan perubahan. Bersamaan dengan itu, ia terbuka untuk mencoba hal-hal baru untuk menguji orientasi hidupnya. Di sinilah, subjek tidak menjadi subjek yang mati dan stagnan tapi subjek yang selalu terbuka untuk memperbarui diri.

Dalam konteks pandemi, pembaruan diri dan keterbukaan ini penting, mengingat ciri manusia yang selalu merupakan individu di tengah jalinan relasi komunalitasnya. Di sini, pembentukan subjek tidak mungkin hanya fokus pada diri dan proyek-proyek pembentukan subjektivitasnya sendiri. Di satu sisi, setiap individu perlu melihat bahwa pandemi adalah peluang untuk mengembangkan diri dan membentuk subjektivitasnya secara tidak terbatas. Di sisi lain, masa pandemi tetaplah masa prihatin yang membutuhkan upaya maksimal dalam kebersamaan dengan subjek-subjek lain. Oleh karena itu, sikap dasar yang perlu ditumbuhkan dalam proses pembentukan subjek di masa pandemi adalah sikap terbuka mengejar kepentingan-kepentingan diri demi keselamatan pribadinya, tetapi sekaligus solider dan mengupayakan keselamatan orang lain. Di sinilah, subjek pasca pandemi harus selalu siap berkolaborasi dengan siapapun dengan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari jaringan struktural umat manusia global. Demikianlah, di masa pandemi yang serba tidak pasti, manusia pasca pandemi ditantang untuk secara kreatif terus menciptakan dirinya, mencoba menguji dan mengembangkan proyek-proyeknya, serta mengevaluasinya untuk menghasilkan proyek-proyek baru penciptaan diri.

## **SIMPULAN**

Kajian atas pemikiran filsafat politik Michel Foucault dalam konteks krisis pandemi Covid-19 membantu untuk melihat bahwa subjektivitas manusia di masa pandemi ini berada dalam situasi paradoksal. Subjek ini pada dasarnya bebas, tetapi dalam kebebasannya, ia sebenarnya disubjeksi (menjadi objek dari berbagai strategi pembentukan subjek) melalui berbagai strategi kuasa. Pada masa pandemi Covid-19, strategi kuasa ini tampak

dalam berbagai upaya politik negara untuk membatasi setiap orang mengekspresikan kebebasannya dengan tujuan untuk membentuk diri yang tetap sehat. Kesehatan diri ini diupayakan dalam rangka mencapai keselamatan bersama.

Strategi kuasa yang berjalan atas manusia di masa pandemi Covid-19 ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan dua model. Model pertama adalah dengan menggunakan skenario pembentukan kota hukuman. Hal ini nampak dalam pembatasan-pembatasan yang disertai ancaman hukuman bagi para pelanggarnya. Di sini, keselamatan dari kematian diupayakan justru dengan ancaman kematian. Model kedua dilakukan dengan berbagai pembatasan akses informasi dan sensor. Tujuannya adalah agar hanya pengetahuan tertentu saja yang terinjeksikan kepada masyarakat. Dengan hanya mengetahui beberapa informasi tertentu saja, masyarakat akan dengan sukarela menaati berbagai aturan yang diberlakukan pada mereka.

Strategi kuasa yang diterapkan pada manusia di masa pandemi Covid-19 pada dasarnya memberi ancaman terhadap subjektivitas manusia. Demi bisa bertahan hidup sebagai manusia, ia harus dihalangi untuk mengekspresikan diri dan kebebasannya. Meski demikian, manusia yang dibatasi subjektivitasnya ini merasa diri bebas karena ia sadar bahwa pembatasan ini adalah demi keselamatan hidupnya.

Dalam situasi pembatasan subjektivitas itu, peneliti melihat bahwa pada dasarnya subjek bisa tetap aktif mengupayakan subjektivitasnya. Hal ini bisa dilakukan jika individu mengupayakan empat hal. *Pertama*, seseorang harus mampu menentukan tujuan hidupnya. *Kedua*, seseorang harus mampu menentukan hal-hal mendasar apa yang harus diubahnya demi mencapai tujuan hidupnya. *Ketiga*, seseorang harus mampu menentukan bagaimana ia akan berelasi dengan hal-hal yang ingin diubahnya agar mencapai tujuannya. *Keempat*, seseorang harus menentukan strategi konkret untuk mengkondisikan diri sehingga diri bisa mencapai tujuannya. Dengan sikap yang terbuka untuk berdialog dengan siapapun, empat hal ini akan membantu individu

untuk tetap mampu mengupayakan subjektivitasnya dan tidak terombang-ambing dalam berbagai arus yang hadir di masa pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyadi, E. K., Sommy H. (2021). Kajian Fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault. *Sorot: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 16, Nomor 2, 2021: 99-117. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.99-117>.
- Carr, D. (1999). *Paradox of Subjectivity, The Self in Transcendental Tradition*. Oxford: Oxford University Press.
- Cheema, S, M. Ameduri, A. Abraham, S. Doraiswamy & R. Mamtani. (2020). The COVID-19 Pandemic: The Public Health Reality. *Epidemiology and Infection* 148, e223, 1-4. <https://doi.org/10.1017/S0950268820002216>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. (diterjemahkan oleh Alan Sheridan dari judul asli *Surveiller et punir: Naissance de la prison*). New York: Penguin Books.
- Foucault, M. (1986). *The Use of Pleasure*. (diterjemahkan oleh Robert Hurley dari naskah berjudul *L'Usage des plaisirs*). New York: Vintage Books.
- Indah, A. V. & Muqsith, A. (2021). *Panic Buying: Konsumerisme Masyarakat Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Psikoanalisis Jacques Lacan*. *Jurnal Filsafat* Vol. 31, No. 1 (2021) hal. 24-48, doi: 10.22146/jf.56722.
- Marcuse, H. (2002). *One Dimensional Man*. London: Routledge Classics.
- Mas'udi, W., Winarti, P. S. (Ed.). (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., ... & Agha, R. (2020). The Socio-Economic Implications of The Coronavirus Pancemic (COVID-19): A Review. Dalam

- International Journal of Surgery Volume 78, June 2020.*  
<https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.04.018>
- Rabinow, P. (ed.). (1997). *Michel Foucault: Ethics Subjectivity and Truth*. New York: The New Press.
- Scholte, J. A. (2002). What is Globalization? The Definitional Issue – Again. *CSGR Working Paper No. 102/02*, Desember. Coventry: University of Warwick
- Schroeder, W. R. (2005). *Continental Philosophy: A Critical Approach*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Sobon, K., Ehaq, T. A. L. (2021). Implikasi Etika Solidaritas Knud Ejler Logstrup Terhadap Korban Virus Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Filsafat Vol 31, No 1 (2021)*  
<https://doi.org/10/22146/jf.57830>.
- Spinelli, A., Pellino, G. (2020). Covid-19 Pandemic: Perspectives on an Unfolding Crisis. *BJS Society*.  
<http://doi.org/10.1002/bjs.11627>.
- Taddeo, Mariarosaria. (2020). The Ethical Governance of the Digital During and After the COVID-19 Pandemi. *Dalam Mind and Machine Vol. 30: 171-176*
- Tadesse, S. & Muluye, W. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on Education System in Developing Countries: A Review. *Journal of Social Sciences Vol. 8 No. 10, October 2020.*  
<https://doi.org/10.4236/jss.2020.810011>.
- Zizek, S. (2020). *Pandemic Covid-19 Shakes The World*. New York: OR Books.